

Kota Bandung Rencanakan Segel 14 Hari Pelanggar PSBB

BANDUNG (IM)- Satuan Petugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Bandung memastikan rencana penambahan waktu penyegekan dari tiga hari menjadi 14 hari untuk pelaku usaha yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perpanjangan itu mengingat masih banyak pelaku usaha melanggar jam operasional buka dan tutup di Kota Bandung.

"Pemikiran kita jadi penguatan penegakan hukum harus lebih maksimal, karena fakta di lapangan jujur saja kita saksikan pelanggaran masih ada," ujar Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna, Senin (22/2).

Ia menuturkan, kebijakan penambahan waktu penyegekan dari 3 hari menjadi 14 hari saat ini masih dalam pembahasan. Namun, rencana tersebut sudah disampaikan dalam rapat terbatas pimpinan. "Hari ini final

kalaupun terjadi perubahan kami kembalikan kembali kepada otoritas kewenangan artinya di sana perwal ada perubahan. Walaupun perubahan ke aspek penegakan hukum," katanya.

Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengaku sudah mendapatkan laporan tentang hasil pemantauan di lapangan dan masih ditemukan pelanggaran PSBB. Oleh karena itu, ia sudah mengintruksikan agar pembahasan penambahan waktu penyegekan segera dituntaskan. "Pak Ema hasil kurkilangan (keliling) malam hari sampai subuh tos (sudah) lapor ke Mang Oded. Intruksi Mang Oded maka tuntaskan pembahasan," katanya.

Pusat data dan informasi Covid-19 Kota Bandung melansir hingga Sabtu (20/2) kemarin, jumlah kasus kumulatif mencapai 11.612. Terdiri dari 946 kasus aktif, 10.437 kasus sembuh dan 229 kasus meninggal dunia. ● pur

DLH Kab. Bogor Dorong Setiap Rumah Sakit Miliki Insenerator

CIBINONG (IM)- Mencuatnya kasus pembuangan limbah bahan berbahaya beracun (B3) alat pelindung diri (APD) di Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Cigudeg beberapa waktu lalu menggugah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor. Kepala DLH Kabupaten Bogor, Asnan mendorong agar rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan masyarakat lainnya memiliki teknologi pengelolaan limbah B3 khususnya APD.

Di Bumi Tegar Beriman, dari lebih dari seratus Puskesmas, klinik dan 29 rumah sakit, baru 4 rumah sakit yang memiliki teknologi pengelolaan limbah B3 yang bernama insenerator. Hal ini "memaksa" mereka bekerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten untuk mengelola limbah B3nya dan "terpaksa" mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, hingga DLH pun khawatir kejadian Hotel PPH selaku Pusat Isolasi Covid 19 yang membuang limbah B3 APD-nya secara ilegal terjadi di fasilitas layanan kesehatan, rumah sakit ataupun Pusat Isolasi Covid 19 yang ada di Kabupaten Bogor.

"Dari ratusan Puskesmas, klinik dan 29 rumah sakit, baru 2 RSUD dan 2 rumah sakit swasta yang memiliki insenerator berikut izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mengantisipasi kasus pembuangan limbah B3 APD seperti beberapa wak-

tu lalu kami pun mendorong rumah sakit untuk memiliki insenerator berikut izin KLHK-nya," ucap Asnan, kemarin.

Selain lebih ramah lingkungan, pria yang lama bertugas sebagai Kabid Pengendalian Operasi Satpol PP ini pun menyakini biaya pengelolaan limbah B3nya akan lebih murah dibanding mengerjakannya dengan pihak ketiga yang berkompeten. "Memang investasi di awal untuk pembelian insenerator cukup mahal tetapi jika bicara jangka panjang, lebih efisien dan ekonomis dibanding mengerjakannya pengelolaan limbah B3-nya dengan pihak ketiga yang berkompeten. Apalagi saat ini ada insenerator yang mit bahan bakar dan lebih maju teknologinya," sambunginya.

Asnan juga mengemukakan akan adanya pasal 104 Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang secara tegas mengatur ancaman sanksi bagi pembuangan limbah B3. "Sanksi atau ancamannya sangat tegas yaitu apabila ada Puskesmas klinik, rumah sakit dan pengelola yang membuang limbah B3nya secara sembarangan, maka akan dikenakan pasal 104 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan akan terkena ancaman minimal penjara satu tahun dan maksimal tiga tahun dengan denda paling banyak Rp 3 miliar," tegas Asnan. ● gio



IDN/ANTARA

RENCANA PEMBANGUNAN RUSUN BAGI PPKS

Suasana Rusunawa Cingised di Bandung, Jawa Barat, Senin (22/2). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana untuk membangun 16 rumah susun yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia bagi masyarakat tidak mampu dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna memberdayakan masyarakat tidak berpenghasilan dari tempat lain serta dapat mengurangi kemiskinan di lokasi sekitar.

Ratusan Warga Terancam Bencana Pergerakan Tanah di Sukabumi

SUKABUMI (IM)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukabumi mencatat setidaknya lebih 400 orang terdampak akibat bencana pergerakan tanah di Kampung Cihayang, Desa Cijangkar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Data BPBD Sukabumi menemukan bencana pergerakan tanah yang melanda wilayah tersebut mengakibatkan 21 rumah tidak bisa dihuni. Puluhan rumah ini ditinggalkan 24 Kepala Keluarga (KK) terdiri atas 58 orang.

Sementara terdapat 108 rumah yang dihuni 122 KK atau 392 orang yang terancam bencana pergerakan tanah. Dampak dari bencana itu pun sebanyak 57 KK atau 170 jiwa mengungsi dengan rincian 20 KK atau 66 jiwa mengungsi di bangunan SD dan sisanya atau 37 KK (104 orang) mengungsi di rumah kerabat.

Tidak hanya fasilitas milik warga yang rusak dan terancam, fasilitas umum di Kampung Cihayang seperti SDN Cihayang, masjid, MCK, musala dan lainnya pun terancam. Bahkan, jika pergerakan tanah semakin masif maka tidak menutup kemungkinan fasilitas lainnya ikut terdampak. Relawan ProBumi Indonesia, Asep Has mengungkapkan nyaris setiap hari pergerakan tanah terjadi di Kampung Cihayang. Kata dia, mulai dari longsor hingga ambles.

Bahkan kata dia, pada Sabtu (20/2) lalu ditemukan lokasi longsor dan anjlok tanah yang dapat mengancam keselamatan warga sekitar. Catatan BPBD Sukabumi, retakan tanah di kampung tersebut rata-rata sekitar satu hingga lima meter dengan kedalaman berbeda

antara 0,5 hingga tujuh meter. Sementara jalan lingkungan dari arah Jalan Cibodas ke Cihayang pun mulai hancur.

Ditambah lagi, adanya tebing yang setiap harinya mengalami longsor serta retakan di jalan tersebut pun melebar serta memporakporandakan jalan penghubung antar-desa. Alhasil, akses tersebut sulit dilalui kendaraan khususnya roda empat.

Demi mengantisipasi kondisi memburuk, sebanyak 14 rumah terpaksa dibongkar karena ambles akibat retakan tanah yang kian lebar. Rumah-rumah yang terpaksa diratakan itu sudah tidak lagi bisa dihuni.

"Kondisi pergerakan tanah masih ada dan sekarang lebih aktif karena di beberapa lereng ada longoran serta anjlok semakin masif, bahkan warga pun berulang kali dikejutkan dengan adanya suara dentuman dari sekitar lokasi bencana," ujar Asep.

Sementara, Plh. Bupati Sukabumi, Zainul mengatakan hasil kajian tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menemukan bencana pergerakan tanah di Kampung Cihayang masuk dalam kategori sedang hingga tinggi. PVMBG merekomendasikan agar warga yang tinggal di lokasi bencana untuk direlokasi. Itu sebab lanjut Zainul, Pemkab kini berkoordinasi dengan instansi lain dan menetapkan lahan milik PTPN sebagai titik relokasi warga. "Kami saat ini sedang menyiapkan berbagai hal, khususnya saranan hunian sementara untuk warga terdampak bencana, agar mereka tidak lama tinggal di pengungsian yang kurang layak," kata Zainul. ● pur

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

WAKSINASI GELOMBANG KEDUA DI JAWA TENGAH

Vaksinasi COVID-19 Sinovac kepada petugas pelayanan publik Pemrov Jateng saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 gelombang II di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/2). Pada vaksinasi gelombang kedua yang diprioritaskan kepada petugas pelayanan publik Pemrov Jateng (Aparatur Sipil Negara), TNI, Polri, pejabat BUMD, wartawan hingga atlet itu, Pemrov Jateng menargetkan minimal 1.000 penerima vaksin dalam satu hari.

SENGKETA DENGAN PTPN VIII

Lahan Pesantren Milik Rizieq Bisa Disita Polisi

PTPN sudah melaporkan masalah ini ke polisi. Rizieq diduga menggunakan lahan PTPN VIII tanpa izin untuk mendirikan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah.

MEGAMENDUNG

(IM)- Rizieq Syihab dinilai sebagai pihak yang harus bertanggungjawab dalam kasus dugaan penyerobotan tanah milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji mengatakan, dalam kasus ini, Rizieq termasuk yang harus bertanggungjawab.

"Yang bertanggungjawab adalah pihak yang melakukan

penyitaan fisik atas tanah tersebut," kata Indriyanto, dikutip dari Antara, Senin (22/2).

PTPN sudah melaporkan masalah ini ke polisi. Rizieq diduga menggunakan lahan PTPN VIII tanpa izin untuk mendirikan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah.

Rizieq disangkakan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang tindak pidana kejahatan perkebunan.

Kemudian, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang kejahatan

penataan ruang, Pasal 167 KUHP tentang memasuki perkarangan tanpa izin, Pasal 385 KUHP tentang Penyerobotan Tanah dan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.

Indriyanto mengatakan, penegak hukum yang diterapkan bisa dengan melakukan penyitaan lahan milik PTPN VIII yang diduga dikuasai Rizieq.

"Dalam rangka menindaklanjuti laporan pidana PTPN, pihak penegak hukum dapat melakukan tindakan upaya paksa atau coercive force dengan melakukan penyitaan terhadap tanah tersebut," ucap Indriyanto.

Menurut Indriyanto, sengketa lahan antara PTPN VIII dengan Rizieq Syihab sebaiknya diselesaikan secara hukum. Prinsip negara hukum bahwa setiap orang sama di depan hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi dalam

bentuk apapun.

Selain pidana, Indriyanto menilai, pihak PTPN bisa melayangkan gugatan perdata terhadap penguasaan melawan hukum secara fisik oleh pihak ketiga.

"Gugatan perdata tidak mengganggu proses hukum pidana yang sedang berjalan. Walau sebaiknya dilakukan secara case by case basis saja," ungkapnya.

Sebelumnya, pakar perantahan dari Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin menilai, FPI tidak berhak mendapat ganti rugi jika PTPN VIII mengambil lahannya. Menurut dia, FPI melanggar banyak undang-undang (UU) dalam masalah ini.

"Terutama UU Perkebunan mereka melanggar dan ada denda yang kurang lebih Rp4 miliar kalau melakukan penyerobotan tanah perkebunan yang telah memiliki HGU,"

ujar Iwan.

Dia menilai akad jual beli tanah yang dilakukan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Indonesia. Karena, pemegang hak atas tanah adalah PTPN VIII, dengan demikian akad terkait lahan harus dilakukan oleh PTPN VIII.

Iwan menambahkan HGU yang dimiliki PTPN VIII diperuntukkan bagi usaha perkebunan, pertanian, peternakan, tambak perikanan. Sementara untuk bangunan, maka sertifikat dalam bentuk hak guna bangunan (HGB).

"Harusnya untuk perkebunan bukan untuk pendidikan dan bangunan," ujarnya.

Menurutnya sudah tepat PTPN VIII meminta pengosongan lahan yang telah diduduki oleh FPI, kecuali bagi petani-petani kecil yang menggarap lahan perkebunan sekadar untuk menyambung hidup. ● pra

WARGA KELUHAN JALAN BERLUBANG

34 Ruas Jalan Rusak Akibat Curah Hujan Tinggi di Bogor

BOGOR (IM)- Akibat hujan yang melanda Kota Bogor belakangan ini, sejumlah ruas jalan di Kota Bogor rusak. Warga pun mengeluh karena jalan berlubang menjadi genangan saat hujan dan licin saat kering.

Ahmad, juru parkir di Jalan Pandu Raya, Bogor Timur mengatakan, hampir sebagian besar ruas jalan Pandu Raya rusak. Kerusakan jalan bervariasi dan sebagian besar jalan berlubang.

"Lubangnya ada yang besar atau yang kecil. Rata-rata jalan berlubang sekitar 2 hingga 3 sentimeter," katanya, Selasa (22/2).

Kata dia, saat hujan beberapa jalan berlubang itu tertutupi genangan air. Sementara, waktu kering jalan jadi licin karena banyak material pasir yang terkelupas.

"Laju kendaraan jadinya pelan mengindri lubang. Tidak menyebabkan macet, tapi beberapa kali pemotor jatuh," paparnya.

Begitu juga ruas jalan di Tentara Pelajar, Bogor Tengah. Setidaknya ada tiga lubang besar di ruas jalan yang menghubungkan Kota Bogor yang sering dilaporkan warga, tapi jalan itu statusnya jalan provinsi dan jalan nasional. Kami langsung koordinasikan," kata Chusnul, Senin (22/2).

Berdasarkan data Dinas PUPR Kota Bogor, terdapat 34 titik jalan berlubang. Warga pun sering melaporkan jika menemukan jalan rusak melalui media sosial. "Dari data Jumat kemarin

Jalan berlubang lantaran genangan air berada di sambungan badan jalan dan jembatan," kata Karta pemilik warung di pinggir jalan.

Kata dia, tingginya curah hujan di wilayah Bogor dan sekitarnya pada beberapa pekan terakhir telah mengakibatkan turunnya kualitas jalan. Ia pun berharap agar jalan rusak segera diperbaiki, lantaran jalan Soleh Iskandar salah satu ruas jalan terpadat di Kota Bogor.

34 Ruas Jalan Rusak

Akibat musim penghujan ini sejumlah ruas jalan di Kota Bogor rusak. Kerusakan jalan tersebar di 34 ruas jalan Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melakukan perbaikan jalan rusak dan berlubang itu.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Chusnul Rozaqi mengatakan, pihaknya bergerak cepat bila ada jalan rusak di wilayah Kota Bogor. Baik berdasarkan laporan warga atau pemantauan di lapangan. "Ada sejumlah jalan berlubang di Kota Bogor yang sering dilaporkan warga, tapi jalan itu statusnya jalan provinsi dan jalan nasional. Kami langsung koordinasikan," kata Chusnul, Senin (22/2).

Berdasarkan data Dinas PUPR Kota Bogor, terdapat 34 titik jalan berlubang. Warga pun sering melaporkan jika menemukan jalan rusak melalui media sosial. "Dari data Jumat kemarin

dari 34 jalan yang berlubang, 6 jalan di antaranya sudah diperbaiki dan 5 jalan masih dalam proses perbaikan," jelasnya.

Di sisi lain, Chusnul mengaku curah hujan yang masih tinggi di wilayah Kota Bogor membuat kondisi jalan berlubang semakin parah. Namun, pihaknya akan terus berupaya memperbaiki jalan-jalan tersebut.

"Pengendara dihimbau berhati-hati melewati jalan yang sedang diperbaiki. Kami terus lakukan perbaikan demi kenyamanan dan keselamatan," ungkapnya.

Laporkan

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor untuk bergerak cepat memperbaiki jalan rusak. Sebab, musim hujan membuat jumlah jalan berlubang terus bertambah. "Saya minta PUPR segera bergerak cepat memperbaiki jalan yang rusak. Jangan sampai membahayakan dan merugikan warga," tegas Bima Arya, Senin (22/2).

Lebih lanjut Bima juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan kerusakan infrastruktur jalan di sekitarnya. "Bagi warga yang ingin melaporkan jalan rusak bisa mengadukannya melalui aplikasi Si Badra. Bisa juga mention dan DM Instagram @pemeliharaan-jalankotabogor," ungkapnya. ● gio



IDN/ANTARA

SEKOLAH DI JAMBI MULAI BELAJAR TATAP MUKA

Guru memberikan materi pelajaran kepada siswa sambil mengenakan masker saat hari pertama dimulainya kembali pembelajaran tatap muka di SDN 82/I Serasah, Batanghari, Jambi, Senin (22/2). Pemerintah Daerah setempat menerapkan kembali pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan di sejumlah sekolah tingkat SD dan SMP mulai (22/2).